

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pada tahun 1998 sistem politik Indonesia berubah dari orde baru menjadi reformasi sehingga adanya kebebasan informasi. Pada saat itu masyarakat menuntut pemerintah menjelaskan kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi korupsi yang dilakukan pemerintahan. Pemerintah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan, aktivitas dan capaian yang diraih hingga tanggapan atas respon, aspirasi dan opini yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah.

Informasi yang berkualitas akan didapat ketika pemerintah transparan dalam pemberian informasi. Menurut Harder dan Jordan (2013) transparansi adalah dasar pada demokrasi ideal dimana masyarakat perlu mengetahui informasi umum tentang bagaimana sumber daya (pajak) yang telah dibayarkan masyarakat dipergunakan.

Dengan dilakukan transparansi, masyarakat akan dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan pemerintah. Transparansi merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjelaskan setiap orang berhak untuk dapat mengakses semua informasi yang bersifat publik selain informasi yang dikecualikan dengan mudah dan ringan biaya.

Sebelum adanya penggunaan internet, pemerintah memanfaatkan media kertas dan radio untuk menyampaikan informasi ke masyarakat tetapi internet adalah instrumen pengungkapan yang lebih efektif daripada komunikasi tradisional dikarenakan penggunaan internet di Indonesia telah meluas. Dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh APJII yang menyatakan sekitar 54,7% dari total penduduk Indonesia yang menggunakan internet atau sekitar 143,26 juta jiwa. Melalui berbagai media di internet, masyarakat dapat mengetahui aktivitas dan kondisi pemerintah secara mudah. Walaupun begitu, tidak semua berita yang ada di internet benar, terdapat berita yang ditulis tanpa ada bukti hanya berdasarkan spekulasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memiliki media internet yang resmi untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Media internet yang sering dipakai pemerintah adalah web karena dengan pemerintah memiliki web resmi tersendiri, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, selain itu masyarakat juga mendapat informasi terpercaya karena web di kelola langsung dari kantor pemerintahan daerah. Penggunaan web tidak hanya untuk pemberian informasi, masyarakat idealnya dapat mengurus perizinan, membuat akta kelahiran, pasport. Selain bermanfaat bagi masyarakat, web juga berguna bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan seperti pembuatan anggaran, surat pengadaan yang merupakan penerapan *E Government*.

Menurut Moon (2002) penggunaan web dan teknologi informasi merupakan aplikasi dari penerapan *e-government* yang akan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di masa mendatang. *E-government* sangat bergantung

dengan teknologi, terutama internet. Ketiga kelas *e-government* (*Publish, Interact, dan Transact*) terdapat pada web walaupun dapat juga diakses melalui aplikasi android. Dalam relasi *E-government* yaitu pada *Government to citizen*(*G to E*) yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat diperlukan informasi yang lengkap dan transparan. Ini dilakukan agar masyarakat percaya dengan pemerintah sesuai dengan tujuan *G to E*.

Mengikuti Da Cruz et al. (2017) dan Gandia et al., (2016), penulis juga melihat transparansi digital dari tingkat pengungkapan informasi di situs web pemerintah daerah. Penulis menggunakan indeks yang berasal dari gabungan *Municipality Transparency Indeks*(*MTI*) dan *Total Disclosure Indeks* (*TDI*).

Di Indonesia masih sedikit penelitian tentang mengukur tingkat transparansi informasi didalam web pemerintah daerah. Penulis yang melakukan penelitian yang mirip dengan ini yaitu Ritonga dan Syamsul (2016) tentang mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia yang berbasis web dan Hasan dan Nurhidayat (2017) tentang Laporan Local Budget Index 2017 hasil penelitian di 70 kabupaten dan kota.

Ritonga dan Syamsul (2016) melakukan penelitian dengan melihat web pemerintah daerah provinsi di Indonesia dan menemukan transparansi pengelolaan keuangan berbasis web di Indonesia masih rendah dengan rata rata 16,84% dengan provinsi yang mendapat nilai transparansi tertinggi adalah Jawa Tengah (50%).

Hasan, Misbah dan Yenti Nurhidayat (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan 70 sampel kabupaten atau kota dan memeriksa informasi yang ada pada web dengan menggunakan *local budget index*. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa web kabupaten dan kota yang paling transparan adalah web kabupaten Kebumen (48,25) dan kota Semarang (45,53). Sedangkan penelitian lain yang mirip hanya meneliti wilayah sumatera barat saja yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kharisma (2018). Dalam penelitian yang dilakukannya, ditemukan kualitas web pemerintah kabupaten dan kota di sumatera barat masih rendah dibandingkan dengan web pemerintah kota Surabaya.

Kementrian komunikasi dan informasi telah memberikan isi minimal yang harus ada pada web tapi tidak ada format khusus dalam pembuatan web pemerintah daerah sehingga cara pengelolaan dan isi web dapat berbeda tiap daerah. Dengan demikian jumlah informasi yang diberikan dapat berbeda. Sehingga transparansi setiap daerah juga berbeda.

Walaupun begitu, pada setiap web pemerintah daerah perlu ada 3 informasi yaitu informasi umum, informasi tentang administrasi dan manajerial, dan informasi mengenai bagaimana hubungan pemerintah dengan pihak luar. Ini dikarenakan 3 informasi ini merupakan informasi yang sering diakses dan diperlukan oleh masyarakat sehingga jika 3 informasi ini tidak ada, web pemerintah belum transparan dan efektif dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tingkat transparansi web pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah web pemerintah daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali. Ini dikarenakan penulis ingin meneliti daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan terendah. Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa tertinggi dibandingkan pulau lain yaitu sebesar 3,35%, kemudian sumatera 0,99% sedangkan yang terendah adalah pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 0,11persen (Movanita; 2018) . Walaupun salah satu pulau yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terendah adalah pulau Bali, tapi pulau Bali merupakan destinasi wisata yang terkenal dan diminati oleh wisatawan Indonesia maupun wisatawan asing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka beberapa masalah yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi informasi umum pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali ?
2. Bagaimana transparansi informasi administrasi dan manajerial pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali ?
3. Bagaimana transparansi informasi tentang hubungan dengan pihak luar pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali ?
4. Apakah kabupaten atau kota yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis transparansi informasi pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali
2. Untuk menganalisis transparansi informasi administrasi dan manajerial pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali
3. Untuk menganalisis transparansi informasi tentang hubungan dengan pihak luar pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali
4. Mengetahui tingkat transparansi yang lebih tinggi antara kabupaten dan kota pada web resmi pemerintahan daerah di pulau Jawa dan Bali

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

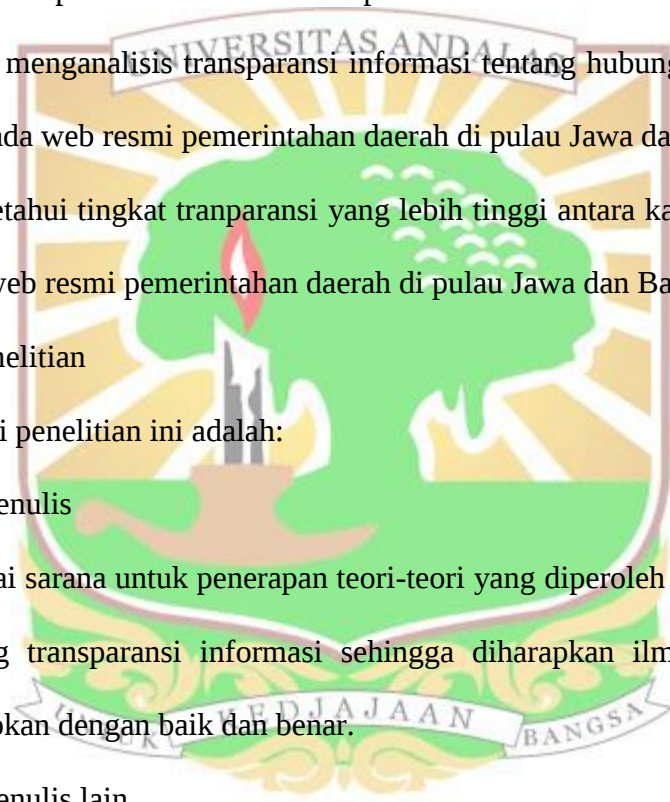
Sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh kuliah khususnya tentang transparansi informasi sehingga diharapkan ilmu tersebut dapat diterapkan dengan baik dan benar.

2. Bagi penulis lain

Sebagai referensi untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

3. Bagi pemerintah

Sebagai referensi untuk mengetahui tingkat transparansi web pemerintah daerah.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas penelitian terdahulu yang sejenis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang berisi desain penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan analisis dari penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.